

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Apeldoorn, L.J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cetakan Ke-24. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1990).
- \_\_\_\_\_. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. (Bandung: PT Revika Aditama, 2006).
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- H.R, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- H.S., Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Huijbers, Theo. *Filsafat hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 2010).
- Magnis Suseno, Franz. *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern / Franz Magnis-Suseno*. (Jakarta: Gramedia, 1988).
- Mahmud, Peter. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cetakan ke-13. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Mahfud MD, Moh. *Peranan Mahkamah Knstitusi dalam pengembangan Hukum Progresif di Indonesia*. (Jakarta: Epistima Institute dan HuMa, 2011).
- Manan, Bagir. *Hubungan Anatar Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. (Bandung: Disertasi Program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, 1990).
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*. (Yogyakarta: FH.UII Press, 2011).
- \_\_\_\_\_. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*. Cetakan Pertama. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).

- Marwan, M S.H. dan Jimmy P, S.H. *Kamus Hukum*. (Surabaya: Reality Publisher, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 2002).
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Situmorang, Victor dan Jusuf Juhir. *aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparat pemerintah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1993).
- \_\_\_\_\_. dan Cormentyna Sitanggang. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011).
- Soetoprawiro, Koerniatmanto. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian Indonesia*. Edisi Kedua. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996).
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konstitusi, Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.*

\_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.*

\_\_\_\_\_. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia.*

### C. **Jurnal Hukum**

Adi Nugroho, Puguh dan Hardi Warsono. “Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pada Disdukcapil Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2012.

Anggriani, Yohana Lumbantobing. “Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar”. *Jom Fisip*, Vol. 2, No.4, 1 Februari 2015.

A. W., Sanjaya. “Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”. *Tesis*, (Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015).

Binol, Fratiwi. “Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, No. 6, Tahun 2015.

Budi Sulisty Nugroho, Fadzlun. “Sifat Keberlakuan Asas Erga Omnes dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Gorontalo Law Review*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2019.

B. V. Runtuwene, Theodoron. “Kajian Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014 Ditinjau Dari Keadilan dan Kepastian Hukum Terhadap Peninjauan Kembali”. *Lex Administratum*, Vol. 3, No. 4, Juni 2015.

Harjanto, Hari Setiawan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran”. *Negara Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.

Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

- Leonard, Sanggup Agustian. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Sebagai Batu Uji Bagi Hakim Dalam Memutus Sengketa Peradilan Administrasi Negara”. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2019.
- Lestari, Florence Daicy dan Gustaaf B. “Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SI AK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado”. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 3. No. 400, 2016.
- Lufti Hakim, Muchamad dan Rasji S.H.,M.H. “Penerapan Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 Dikaitkan Dengan Asas Negative Legislator”. *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, No. 2, Tahun 2018.
- M, Fence Wantu. “Antinomi dalam Penegakan Hukum oleh Hakim”. *Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19, No. 3, Oktober 2017.
- Putri Hapsari, Elisabeth. “Kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Menggunakan Asas Ultra Petita Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No.5k/Tun/1992 (Studi Kasus Putusan No.32/G/2012/Ptun.Smg)”. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 2, Tahun 2017.
- Sembadra, Nora Mahardhika dan Endang Larasati. “Analisis Kualitas Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”. *Journal Of Public Policy And Management Review*, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.
- Sri, Nanang Darmadi. “Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Hukum*, Vol. XXVI, No. 2, Agustus 2011.
- Satria Buana, Mirza. “Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi”. *Tesis*, (Yogyakarta: Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2010).
- Sucahyono. “Erga Omnes Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 4, Tahun 2019.
- Sulardi dan Yohana Puspitasari Wardoyo. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak”. *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015.

Triyansari, Agustin dan Teguh Santoso. “Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Anak Di Luar Nikah Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya”. *JPAP*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.

#### **D. Artikel**

Anonim. “Akte Kelahiran Anak dan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”. *www.kompasiana.com/*, 25 Juni 2015.

Anonim. “Disdukcapil DKI Jakarta”. <https://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=fullpage>, 30 Oktober 2020.

APA: aparatur pemerintah. 2016. Pada KBBi Daring. Diambil 23 Oktober 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/aparatur%20pemerintah>.

\_\_\_\_\_.hukum acara perdata. 2016. Pada KBBi Daring. Diambil 23 Oktober 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum%20acara%20perdata>.

\_\_\_\_\_.pengadilan negeri. 2016. Pada KBBi Daring. Diambil 23 Oktober 2020, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengadilan%20negeri>

Cermati.com, “Cara, Syarat dan Biaya Mengurus Akta Kelahiran Baru”, <https://www.cermati.com/artikel/cara-syarat-dan-biaya-mengurus-akta-kelahiran-baru> , 14 Januari 2020.

Disdukcapil DKI Jakarta. “Akta Kelahiran”. <http://kependudukancapil.jakarta.go.id/pages/?page=index&a=2&b=7> , Tahun 2018.

Disdukcapil Kabupaten Kepulauan Sangihe. “SIAK Online”. <http://disdukcapil-sangihe.id/pelayanan-online/>, 28 Desember 2020.

KPAI. “Akta Kelahiran Adalah Hak Setiap Anak Indonesia, Batalkan UU yang Persulit Pembuatan Akta Kelahiran”. *www.kpai.go.id*, 5 juni 2013.

Ratnaningsih, Erna. “Asas Erga Omnes Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. <https://business-law.binus.ac.id/2017/10/31/asas-erga-omnes-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi/>, Oktober 2017.

Sahbani, Agus. “Kemendagri Terbitkan Pedoman Akta Kelahiran”. [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 21 Mei 2013.